

**ELITE PENENTU DALAM POLITIK LOKAL
(Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014)**

Oleh :

Bai rahmat

Email : bayrahmat10@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

ABSTRACT

Political developments brought a number of theologian involved directly or indirectly in the political scene. theologian political aspirations exploited the political parties at national and local level in each general election. As a result, theologian faced with the world of politics, as happened on the legislative elections in Bengkalis District Bantan 2014, the scholars who contribute to winning one of the first candidate in the electoral district on behalf of the District Bantan Sofyan.

The formulation of the problem in this research is how the role of the theologian against Sofyan winning candidate in the electoral district I Bengkalis District Bantan and what are the factors that influence the theologian involved to winning Sofyan. The purpose of this study to know how the role played by theologian in determining victory Sofyan, as well as for know what are the factors that influence the involvement of theologian against the winning Sofyan. This type of research is descriptive with qualitative approach. Informants in this study is, legislators Bengkalis, chairman of the foundation, chairman, director of KMI, Nurul Hidayah alumni of the boarding school, and the community Bantan. Data collection techniques with interviews to know how the role of the theologian against winning Sofyan. Qualitative data analysis technique that is performed on the data, in this case in the form of qualitative data is then associated with the data information other to gain clarity on the truth.

The results of this study, the involvement of theologian against the winning Sofyan done by direct and indirect, As well as for factors that affect theologian support sofyan namely because by sofyan is alumni of pesantren Nurul Hidayah, so that if elected will sofyan education at boarding school always gets the full attention of the government.

Keywords: Elite Determinants, Theologian, Local Politics

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (siyasah) adalah pemeliharaan urusan umat (ri'ayatu syu'unil ummah), dalam dan luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah daulah (negara). Sedangkan umat melakukan muhasabah (kritik, saran, dan nasihat) kepada daulah (khalifah). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan mabda (aqidah dan peraturan-peraturan) Islam di dalam negeri.

Politik dalam negeri tersebut berkaitan dengan praktek demokrasi, yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivis, profesi dan para pemilih pemula. Tokoh agama seperti kaum ulama merupakan bagian dari politik Islam yang mendukung perkembangan politik lokal. Politik lokal merupakan semua kegiatan politik yang berada pada tingkat lokal, dalam hal ini diantaranya Kota, Kabupaten, dan Desa. Politik Lokal juga membahas bagaimana peran kaum ulama sebagai tokoh agama yang mendukung aktivitas politik dalam negeri.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan pernyataan diatas, maka pemilihan umum didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, profesi serta elit politik yang menjadi calon pemilihan umum terutama pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pemilihan umum, ulama yang berada di pondok pesantren kerap kali jadi sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu, maka suara ulama dan santri selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja, melainkan juga partai-partai politik yang berbasis nasionalis. Kunjungan elit partai kepesantren menjadi wajib dengan harapan bisa mendulang suara, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bantan tahun 2014, adanya salah satu calon anggota legislatif memintak dukungan kepada para ulama beserta para santri yang ada di pondok pesantren Nurul Hidayah yang terletak di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pondok pesantren Hurul Hidayah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren ini juga menjadi pusat pengajaran agama pada masyarakat sekitar dengan digelar nya ceramah-ceramah khusus untuk masyarakat. Pondok pesantren Nurul Hidayah sebagai lembaga pendidikan menyatakan bahwa lembaga ini tidak ada hubungan apapun dengan partai politik manapun dan memilih netral dari politik. Namun tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan sebagai mana yang telah dicantumkan kedalam buku kepondok modernan yaitu: bahwasannya pondok tidak berinduk kepada partai politik dan golongan pondok adalah perekat umat. Semboyan pondok "*Berdiri diatas dan untuk semua golongan*". Pondok adalah lembaga pendidikan Islam untuk semua golongan, yang tidak berpolitik praktis. Seandainya pondok berpolitik praktis bisa berakibat:

a. Perpecahan di lembaga pendidikan

b. Pondok terpengaruh oleh politik dan golongan

c. Nilai pendidikan atau Islamnya bisa terpengaruh

Selama di Pondok, santri tidak boleh berpolitik praktis, sedangkan di masyarakat nanti terserah. *Buta Politik, jangan. Berpolitik praktis nanti di masyarakat.* Walaupun pondok pesantren Nurul Hidayah tidak berpartai dan untuk semua golongan dan tidak berpolitik praktis, tetapi ulama beserta santri yang berada di pondok pesantren Nurul Hidayah turut berpartisipasi dalam pemilihan dan memberikan dukungan kepada salah satu calon anggota DPRD kabupaten bengkalis tahun 2014 atas nama Sofyan.

Dari beberapa persoalan permasalahan diatas, maka dalam hal ini perlu penulis menganalisis bagaimana peran ulama serta faktor-faktor yang mempengaruhi berperannya ulama terhadap kemenangan Sofyan. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian. ***“ELITE PENENTU DALAM POLITIK LOKAL(Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Kemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan bantan kabupaten Bengkalis tahun 2014)”***.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Elite

Untuk menjelaskan mengapa elit penentu terlibat ganda di dunia modern, kita harus melihat proses-proses sosial yang telah membentuk dunia tersebut. Golongan elit berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang utama:

- Pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan spesialis jabatan
- Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi

- Perkembangan keragaman moral

Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elit pun menjadi semakin banyak, semakin beranekaragam, dan lebih bersifat otonom. Pengertian bahwa elit mengabdikan pada fungsi sosial adalah suatu yang agak umum, yang dijumpai dalam satu atau lain bentuk kebanyakan tulisan mengenai hal tersebut. Tetapi sedikit dari penulis itu, yang melangkah lebih jauh dari generalisasi untuk menelusuri saling keterikatan yang khas antara para elit itu dalam fungsi-fungsi sosial mereka.

Golongan elit penentu adalah sebagian badan kolektif, maupun lembaga kolektif. Dalam peranan mereka sebagai badan, segi sebagai alat muncul kedepan, bagaimana dan sejauh mana baiknya mereka melaksanakan peranan kepemimpinan mereka. Dalam peranan simbolik mereka unsur ekspresif yang berkuasa semacam kesan umum yang mereka ciptakan. Kesatria jaman lama, selain terlatih dalam strategi taktik, harus juga mengambil bagian.

Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tatanasosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

Sejalan dengan Pareto, Mosca menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu

mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elit.

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elit karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikiran ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat. Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan elit adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besioligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.

Teori Elit misalnya menegaskan bahwa ialah yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang mencakup:

1. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.

2. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan:

- a. Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada.
- b. Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru yang masuk dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Integrasi Elit dengan Khalayak ialah upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang memerintah dan khalayak atau rakyat yang diperintah. Integrasi antara elit dan khalayak tidak berarti melenyapkan perbedaan diantara mereka. Kalau integrasi dilihat sebagai proses maka integrasi elit dengan khalayak merupakan proses kelembagaan rakyat.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa

yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Dari pengertian partisipasi politik yang diungkapkan para pakar di atas, memberi informasi bahwa partisipasi politik lebih dialamatkan kepada aktivitas masyarakat (warga negara) di dalam turut memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu :

- (1) Pemilihan penguasa, dan
- (2) Melaksanakan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintahan).

Berikut ini beberapa Fungsi Partisipasi Politik yakni:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dari sisi lain, Arbi Sanit memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintahan yang

dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, hura-hura, dan kudeta.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, kesembilan tingkatan partisipasi itu adalah:

1. *Voting* (pemberian suara dalam pemilu). Merupakan tingkat partisipasi paling rendah, karena hanya dilakukan secara periodik, tidak rutin.
2. Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik.
3. Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-polical*)
5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-polical*)
6. Menjadi anggota biasa dalam sebuah Partai Politik
7. Menjadi pengurus aktif dalam sebuah Partai Politik
8. Secara profesional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau jabatan administratif.
9. Secara profesional menduduki jabatan politik di Pemerintahan atau jabatan Administratif. Ini adalah tingkat partisipasi yang tinggi.

Nilai-nilai Partisipasi Politik, menurut Dedi Iriawan ada empat nilai partisipasi politik yang akan menambah bobot dalam partisipasi politik, yaitu:

1. Tingkat Inisiatif.
2. Toleransi Terhadap Perbedaan Pendapat.
3. Tingkat Kebersamaan (*consensus*).
4. Besarnya Keberhasilan (*output*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana jenis penelitian ini didasarkan pada hasil pendapat serta analisis dari para ahli yang sudah terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jenis ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Karena Desa Bantan Tua merupakan lokasi Pesantren Nurul Hidayah sebagai Objek Penelitian, dimana kaum Ulama yang berada di pondok Pesantren Nurul Hidayah terlibat sebagai Elit Penentu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. Alasan lokasi penelitian ini, dikarenakan penulis merupakan alumni pesantren Nurul Hidayah dan merupakan objek penelitian yang sesuai dengan bidang Ilmu Pemerintahan.

Sumber Data penelitian ini menggunakan informan kunci yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan oleh penelitian, yang sesuai dengan informan ini adalah Bapak Sofyan sebagai Anggota DPRD Fraksi PDI-P, Para Ulama serta Guru-Guru Santri.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang penulis anggap banyak mengetahui tentang masalah yang peneliti ajukan. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive yaitu menentukan informan dengan memilih unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan Objek Penelitian yaitu di Desa Bantan Tua khususnya Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Adapun informan tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara terbuka dengan informan penelitian. Data ini berupa kutipan wawancara langsung dan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Data primer mencakup hasil-hasil rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian. Data yang diperlukan dari lapangan yaitu Hasil Rekapitulasi Penetapan DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Jumlah Ulama yang terlibat sebagai Elit Penentu, dan Pesantren sebagai sarana pendukung dalam penelitian ini serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

1. Wawancara, yaitu menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh informan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu menelusuri data-data dokumenter yang berkaitan

dengan Keterlibatan Ulama sebagai Elit Penentu pada Pemilihan DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang

diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya ulama dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Peran ulama memiliki posisi sentral atau penting dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu partai politik maupun calon dalam pemilu, apalagi seorang ulama atau sering disapa kyai oleh masyarakat, yang mempunyai pondok pesantren baik yang sudah mashur maupun yang lingkungannya masih bersipat lokal di daerah masing-masing akan sangat berpengaruh sekali perannya dalam memobilisasi masa yang tentunya, secara tidak langsung ikut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Kondisi semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh para elit politik untuk menjaring masa dukungan guna memenangkan kancah percaturan dalam pemilihan umum.

Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan tidak begitu disorot oleh politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat suara politiknya. Mengapa? Karena, ulama atau sering disapa kiai oleh masyarakat yang merupakan sebagai pengasuh pesantren mempunyai karisma yang luar biasa dimata santri dan masyarakat sekitarnya. Dengan berbasis keagamaan santri dan masyarakat akan mendengar dan patuh kepada kiai, mereka cenderung irasional.

Dilain pihak kalangan pesantren dalam menjalankan perannya sebagai lembaga dakwah juga terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pesantren lebih menitik beratkan pendekatan sosiokultural, pesantren ini cenderung tertutup dan tidak bersedia pesantrennya dikunjungi elite politik dan pejabat pemerintah. Kelompok kedua, pesantren yang terbuka kepada politik bahkan ada pula yang terlibat langsung dengan politik praktis, kelompok ini membuka pintu lebar-lebar kepada para elite politik atau pejabat pemerintah, pengasuh pesantren juga bersedia berkunjung kekediaman mereka. Kelompok ketiga, pesantren yang terbuka kepada politik dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, karna di khawatirkan akan terpecahnya di lembaga pendidikan, tetapi mendukung terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan pendidikan.

Dari tiga kelompok yang dijelaskan diatas maka pondok pesantren Nurul Hidayah termasuk kelompok yang ketiga, yaitu pesantren yang terbuka kepada politik tetapi tidak terlibat langsung dengan politik praktis. Terbukanya pondok pesantren kepada politik hanya sebatas mendukung kebijakan pemerintah ataupun mendukung salah satu calon pemilu dan tidak menjadi juru kampanye maupun tim sukses elite politik. Sebagaimana dituliskan di buku sekilas tentang kepondok modern yaitu *"Pondok Tidak Berinduk Kepada Partai Politik dan Golongan"*.

Adapun alasan yang melatarbelakangi pondok pesantren Nurul Hidayah terbuka terhadap politik sebagai berikut:

1. Alasan historis, yaitu tradisi yang dirintis oleh pendiri pesantren tersebut

memang terbuka kepada siapa saja termasuk elite politik dan pejabat.

2. Alasan teologis, sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka, mereka berpendapat partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok maupun pribadi.
3. Alasan strategis, agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan kekuasaan sehingga dapat mempermudah atau memperlancar proses pendidikan dipesantren.

Peran ulama terhadap kemenangan Sofyan pada pemilihan Legislatif tahun 2014 merupakan bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi, keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Dalam pemilihan umum, ulama yang berada di lingkungan pondok pesantren yang biasa disapa Kiai oleh masyarakat kerap kali jadi sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu, maka suara ulama dan santri selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja, melainkan juga partai-partai politik yang berbasis nasionalis.

Kunjungan elit partai kepesantren menjadi wajib dengan harapan bisa mendulang suara, sebagaimana kasus yang terjadi pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bantan tahun 2014, salah satu calon anggota legislatif dari partai PDIP meminta dukungan kepada para ulama beserta para santri yang ada di pondok pesantren Nurul

Hidayah yang terletak di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atas nama Sofyan.

Berikut ini ada dua cara yang dilakukan ulama untuk meningkatkan dukungan para pemilih terhadap Sofyan. Adapun cara yang dilakukan ulama yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Berikut penulis menguraikan peran ulama dalam meningkatkan dukungan para pemilih terhadap Sofyan.

1. Peran Ulama Secara Langsung

Kiprah ulama secara langsung dalam proses mendorong kesadaran pemilih sebenarnya sudah lama dilakukan, baik yang secara terang-terangan, terjun langsung dalam partai maupun tidak. Peran ulama dalam meningkatkan kesadaran pemilih secara langsung akan memotifasikan pemilih untuk sadar dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih seseorang pemimpin yang adil, jujur, dan amanah.

Berperannya ulama secara langsung hanya sebatas dilingkungan pondok pesantren itu sendiri, yaitu mempengaruhi guru, santri dan alumni karna dikhawatirkan apabila ulama ikut kedunia politik diluar pondok pesantren dan menjadi juru kampanye salah satu calon partai politik atau tim suksesnya paslon maka bisa membuat terpecah belahnya lembaga pendidikan dipesantren dan nilai keislamannya akan terpengaruhi oleh dunia politik.

Berperannya ulama secara langsung dalam menentukan kemenangan Sofyan pada pemilihan legislatif dilingkungan pondok pesantren tidak memiliki maksud dan tujuan untuk memasukkan politik kelingkungan pesantren. Melainkan hanya sebatas untuk mempengaruhi para guru – guru beserta santri sebagai pemilih pemula, dan para alumni agar bisa untuk

berpartisipasi memilih pasangan calon yang didukung oleh ulama.

1. Peran Ulama Secara tidak langsung

Ulama merupakan orang yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat tidak heran apabila setiap perkataan ulama selalu didengar dan dipercaya oleh masyarakat, dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentu mempermudah ulama untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon yang didukung oleh ulama. Peran ulama secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengajian-pengajian maupun melalui jam'iyah-jam'iyah yang ada dikalangan masyarakat.

Kedekatannya ulama terhadap masyarakat dalam memberikan pengajian pengajian maupun ceramah agama melalui jami'ah-jamiah yang ada dikalangan masyarakat, tentu memberikan peran secara tidak langsung bagi ulama untuk mengajak masyarakat untuk memilih Sofyan, dengan memberikan pengajian kepada masyarakat ulama bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah yang disukai oleh ulama. Apalagi Sofyan merupakan asli masyarakat bantan itu sendiri sehingga mempermudah ulama untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Sofyan yang merupakan asli masyarakat Bantan tersebut.

Berperannya ulama dalam menentukan kemenangan Sofyan didasari beberapa faktor. Pertama, Faktor Internal, merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam, adapun faktor internal yang mempengaruhi ulama ikut berperan dalam menentukan kemenangan Sofyan adalah:

a). Sofyan Alumni Pondok Pesantren Nurul Hidayah

Status Sofyan sebagai alumni pondok pesantren nurul hidayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ulama berperan dalam pemenangan sofyan. Dengan alasan untuk membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah. Sebagaimana yang tertulis didalam misi pondok pesantren Nurul Hidayah yaitu *“membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah, dan mengabdikan kepada masyarakat”*.

b). Pembangunan Pondok Pesantren

Demi masa depan pondok pesantren untuk kedepannya yang lebih baik dan lebih berkembang serta dikenal masyarakat banyak, membuat ulama mendukung penuh serta ikut berperan dalam menentukan kemenangan sofyan. Karna sebelum Sofyan menjabat sebagai anggota DPRD pondok pesantren Kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam membangun fasilitas di pondok pesantren. Apabila sofyan terpilih nantinya justru mempermudah kepada ulama untuk memperlancar urusan pembangunan dipondok pesantren yang setiap tahunnya jumlah santri semakin meningkat sehingga membutuhkan fasilitas yang memadai seperti asrama, ruang belajar, lapangan olahraga, perpustakaan dan lain sebagainya.

Kedua. Faktor Eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi ulama ikut berperan dalam menentukan pemenangan Sofyan adalah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Bantan dan Kabupaten Bengkalis.

Sofyan sebagai masyarakat Bantan membuat ulama ikut berperan dalam kemenagann Sofyan apalagi ulama merupakan asli masyarakat Bantan. Ikutnya ulama berperan selain untuk

kepentingan pondok pesantren itu sendiri juga untuk kepentingan masyarakat Bantan kedepannya.

Selama ini pembangunan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis memang sungguh memperhatikan, salah satunya dari pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan umum yang banyak terdapat jalan yang berlubang dan belum disemenisasi, padahal Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten terkaya di Propinsi Riau, tetapi belum bisa mensejahterakan kepentingan masyarakat.

Hal inilah yang menggerakkan ulama ikut berperan dalam mendukung Sofyan dengan tujuan apabila Sofyan terpilih menjadi anggota Legislatif nantinya Kecamatan Bantan selalu diperhatikan pemerintah baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun prekonomian masyarakatnya.

Semenjak tanggal 1 januari 1989 pondok didirikan hingga pada tahun 2008, pondok pesantren Nurul Hidayah kurang mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah, padahal pondok pesantren Nurul Hidayah merupakan salah satu pusat pendidikan agama islam dikabupaten bengkalis. Semenjak tahun didirikan pondok pesantren hingga tahun 2008 hanya ada satu bangunan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten bengkalis yaitu bangunan berupa asrama santri putri dengan dua lantai yang diresmikan pada tahun 2004 pada zaman pemerintahan bupati Drs. H. Syamsurizal. MM. Sedangkan asrama santri putra masih menggunakan asrama serta ruangan belajar berdinding papan yang dibangun oleh masyarakat sekitar dan ulama yang mendirikan pondok pesantren pada waktu itu.

Semenjak terpilihnya Sofyan sebagai anggota legislatif Kabupaten Bengkalis selama dua priode, pimpinan

beserta para guru dan santri selalu mengundang Sofyan apabila ada acara-acara hari besar pondok pesantren Nurul Hidayah. Seperti acara Apel Tahunan, Perkemahan Akbar, Art Six Show, maupun acara MTQ sepondok pesantren Nurul Hidayah. Maksud dan tujuan ulama diundangnya Sofyan untuk menghadiri acara-acara hari besar pondok pesantren selain untuk bersilaturahmi juga untuk membicarakan nasib pondok pesantren Nurul Hidayah kedepannya.

Selama Sofyan menjabat sebagai anggota DPRD selama dua priode perubahan yang dialami pondok pesantren terutama dalam segi pembangunan fasilitas kebutuhan para santri selalu meningkatkan hal ini tercatat ada beberapa pembangunan yang dibangun ketika Sofyan menjabat sebagai anggota DPRD selama dua priode. Karna dengan terpilihnya Sofyan sebagai anggota DPRD, Pondok pesantren Nurul Hidayah selalu mendapat tanggapan positif dari pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran ulama terhadap pemenangan Sofyan caleg dapil I Kec. Bantan Kab. Bengkalis tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa berperannya ulama terhadap kemenagan Sofyan dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, adapun cara langsung dilakukan ulama dengan mempengaruhi para santri sebagai pemilih pemula serta ustdz dan ustdzh dan para alumni, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengajian-pengajian yang ada dikalangan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ulama mendukung sofyan yaitu

dikarnakan sofyan merupakan alumni pondok pesantren Nurul Hidayah, sehingga apabila sofyan terpilih nantinya menambahkan kekuasaan kepada pondok pesantren untuk mempengaruhi pemerintah agar pendidikan di pondok pesantren selalu mendapat perhatian dari pemerintah.

SARAN

Berkenaan dengan hasil penelitian ini meski hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ulama berperan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemenangan Sofyan pada pemilihan Legislatif tahun 2014 namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ulama apabila ikut berperan dalam menentukan kemenangan elit politik pada pemilihan yaitu:

1. Diharapkan kepada ulama untuk tidak selalu mementingkan pembangunan untuk pesantren tetapi ulama juga harus bisa mementingkan kepentingan masyarakat sekitar agar masyarakat selalu mendapat tanggapan dari pemerintah.
2. Diharapkan kepada ulama agar selalu ingat tugas seorang ulama dan selalu bisa tetap menjaga pendidikan dipesantren supaya tidak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik karna dikhawatirkan bisa merusak tugas ulama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Partisipasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka UI, Ed. Revisi Cet III

Efriza. *Political Explore*. Defenisi Partisipasi Politik. Bandung: Alfabeta, Cet Kesatu 2012

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers

H Kusnanto. 2008. *Metode Kualitatif*. Ciri-ciri Penelitian Kualitatif. IKM Pascasarjana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Mas'od, Mohtar, dan Colin Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Studi Perbandingan Elit Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet 13 . 1995

Pondok Modern Nurul Hidayah. *Sekilas Tentang Pondok Modern*. BantanTua Bengkalis : 2006

Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dasar-dasar Wawancara. Jakarta :Gramedia Pustaka

Suzanne Keller, 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, cet. II, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Partisipasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999 Cet III

Sari knopp, Robert C and Biklen, Bodgan. 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to theory and methods*, Bacan :Allyn and Bucon, Inc.,

Varma, 2003, *Teori Politik Modern*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

Hafis AR, Abdul. *Konsep Politik Islam Dalam Negeri*. Elit Politik Islam. Pekanbaru: FISIP UR, 2013

Khakim, Lukman. *Pengertian Politik Lokal dan Sejarah Politik Lokal*. Defenisi Politik Lokal. Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Mushadad, Ahmad. Jurnal Universitas Negeri Semarang. Peran Kiai Nadhatul Ulama Terhadap Kondisi Politik di Kabupaten Jepara 1999-2004 (Kajian Sejarah Sosial Politik). 2005

Regulasi/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu